



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4489-4506

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Dinamika Konflik Pemilihan Umum Di Kota Bandung

Yogi Gumilar Saeful Akbar^{1✉}, Algeri Yusuf Ahmad Choir², Amelia Nurfaadiyah³, Devina

Novelia⁴, Leciana Juliana⁵, Nabila Rahmadani⁶, Windy Dwi Yulia⁷

Universitas Langlangbuana

Email: yogi.gumilar@unla.ac.id[✉]

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) seringkali menimbulkan konflik, baik konflik yang timbul antar-pemilih maupun pemilih dengan penyelenggara. Konflik tersebut dapat dipicu karena berbagai faktor yang melatarbelakangi pemilih maupun calon yang terlibat dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik pemilu di Kota Bandung dengan mengidentifikasi dan menggali faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan konflik, yaitu perbedaan antar-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan merujuk pada teori Soerjono Soekanto, yang memaparkan bahwa faktor penyebab konflik dapat memengaruhi tingkat keparahan konflik. Lokasi penelitian difokuskan pada Kota Bandung, dengan menganalisis kondisi dalam pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suasana pemilu di Kota Bandung tahun 2024 berjalan kondusif karena masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dalam memahami proses pemilu, sehingga kemungkinan konflik dari faktor yang diteliti dapat ditanggulangi dan diselesaikan dengan efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terjadi konflik signifikan di masyarakat Kota Bandung, mengindikasikan bahwa pemahaman yang baik terhadap pemilu dapat mengendalikan dan menyelesaikan potensi konflik.

Kata Kunci: *Analisis Konflik, Faktor Pemicu Konflik, Pemilu*

Abstract

The implementation of elections often gives rise to conflicts, both between voters and among organizers. These conflicts can be triggered by various factors involving voters and candidates participating in the election. This research aims to analyze election conflicts in the city of Bandung by identifying and exploring factors that have the potential to cause conflict, such as individual differences, cultural disparities, variations in interests, and societal changes. A qualitative approach, referencing Soerjono Soekanto's theory, which explains how factors causing conflict can influence its severity, was used in this research. The study focused on the Bandung city, analyzing the conditions surrounding the 2024 election. The research findings indicate that the election atmosphere in Bandung in 2024 was conducive due to the community's political knowledge. Consequently, potential conflicts arising from the identified factors could be addressed and resolved effectively. Interview results revealed no significant conflicts among the people of Bandung City, suggesting that a thorough understanding of elections can mitigate and resolve potential conflicts.

Keywords: *Onflict Analysis, Conflict Trigger Factor, Election*

PENDAHULUAN

Pada era demokrasi, integritas pemilihan umum menjadi landasan utama untuk menjadikan suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Presiden Republik Indonesia, 2017a). Pemilu merupakan ajang untuk memenuhi posisi di pemerintahan yang dilakukan secara sah melalui pemilihan oleh masyarakat untuk menentukan pemimpin dan wakil, untuk penyampaian aspirasi mereka (Anggara, 2019). Pemilu memiliki peran ganda, berfungsi sebagai tempat di mana konflik muncul dan juga sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Sebagai arena konflik, pemilu muncul sebagai hasil dari ketegangan antara partai yang bersaing, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan konfrontasi fisik atau non fisik. Sementara itu, sebagai instrumen resolusi konflik, pemilu dianggap sebagai proses yang dapat mengakhiri ketegangan dengan memberikan keputusan melalui suara rakyat (Anggraini et al., 2019).

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi momen penting dalam kehidupan demokratis suatu negara. Sebagai bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat, pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka

dalam lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Aspirasi merupakan suatu impian atau harapan yang menjadi landasan bagi tuntutan perubahan atau pemenuhan kebutuhan yang dirasakan oleh individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Dalam konteks pemilu, aspirasi masyarakat dapat meliputi beragam hal, mulai dari penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, hingga penanganan masalah kesenjangan sosial.

Ketika memilih calon wakil rakyat dan partai dalam pemilu, masyarakat cenderung memberikan suaranya pada mereka yang dianggap mampu mewakili serta mewujudkan aspirasi yang mereka miliki. Visi dan misi yang diusung oleh calon atau partai menjadi faktor penentu dalam proses pemilihan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat memainkan peran penting dalam dinamika pemilu. Sebagai contoh, dalam sebuah pemilu, masyarakat mungkin memiliki aspirasi untuk melihat peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mereka berharap agar calon yang mereka pilih nantinya dapat menjadi penggerak dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara mereka. Selain itu, aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting. Masyarakat ingin melihat adanya kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, penyelesaian permasalahan kesenjangan sosial juga menjadi fokus aspirasi bagi sebagian besar masyarakat. Mereka berharap adanya kebijakan yang mampu mengurangi disparitas ekonomi dan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, calon-calon yang mampu memberikan solusi konkret terhadap masalah-masalah tersebut akan mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat.

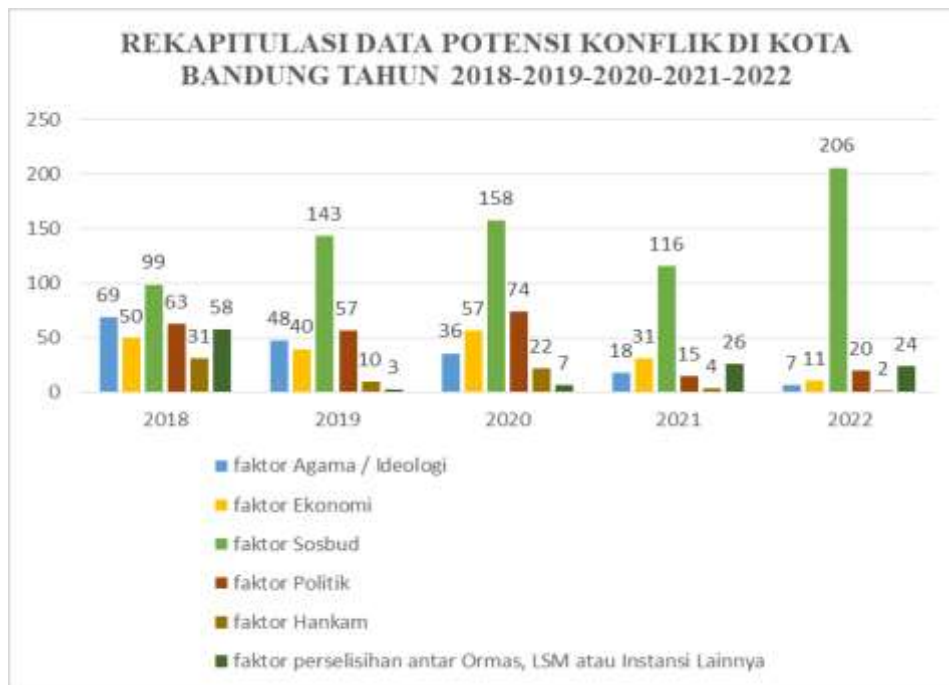
Dalam praktiknya, aspirasi masyarakat tercermin dalam dinamika politik sehari-hari. Para calon dan partai politik berusaha untuk memahami dan menggambarkan diri mereka sebagai pihak yang mampu mewujudkan aspirasi tersebut. Melalui berbagai macam kampanye dan program-programnya, mereka berupaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa visi dan misi mereka sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas.

Namun, aspirasi masyarakat tidak selalu seragam. Masyarakat terdiri dari beragam lapisan dan kelompok dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam konteks pemilu, sangat penting bagi calon dan partai politik untuk memahami serta merespons aspirasi yang beragam ini dengan bijak. Keterbukaan untuk mendengarkan dan mewakili berbagai suara dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam meraih dukungan pemilih. Dalam konteks pemilu yang semakin terbuka dan demokratis, partisipasi aktif masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat harus merasa

bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka diperhatikan dan diwakili oleh para pemimpin yang terpilih. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin terpilih menjadi hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

Kepemimpinan lokal memainkan peran yang sangat vital dalam merancang strategi dan membentuk tim pemenang selama pemilihan umum, yang dijadikan sebagai poros utama dalam memberikan aspirasi terhadap masyarakat. Kepemimpinan lokal yang berfokus pada evaluasi pasca pemilu dalam melakukan pembelajaran yang mencakup pengalaman kampanye diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan strategi untuk pemilihan umum yang akan datang. Sebagai contoh, pemilihan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 2 pada pemilu 2024, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Kepercayaan masyarakat terhadap pengaruh kepemimpinan lokal Ridwan Kamil dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan pencapaian prestasi dalam masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat dianggap dapat menarik kepercayaan masyarakat dalam pemilihan umum. (Dirgantara, 2023)

Perbedaan aspirasi dan pilihan politik dapat memicu konflik akibat perbedaan isu yang diperjuangkan. Dalam penyelenggaraan pemilu khususnya di Jawa Barat, Kota Bandung, sebagai pusat kegiatan politik dan sosial, menjadi lokasi yang memiliki kondisi pemilu yang dinamis. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di Jawa Barat, Kota Bandung menjadi lingkungan yang dinamis selama proses pemilu. Partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat tetap mendatangkan tantangan kompleks terkait konflik dalam pemilu. Konflik-konflik ini tidak hanya berasal dari persaingan politik, tetapi juga melibatkan berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat yang menjadi isu dalam aspirasi, seperti agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Politisasi identitas menjadi salah satu sumber konflik yang paling sering ditemui di Indonesia. Sebagai contoh pada kasus pemilu 2019, politik identitas dengan membawa simbol agama dijadikan sebagai alat dalam pemilu melalui media kampanye, terutama di media online untuk menunjukkan bahwa kandidat memiliki ketaatan agama yang tinggi. Politisasi agama tersebut kemudian berkembang dan menghasilkan politik kebencian (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Pada pemilu di Kota Bandung, faktor agama menunjukkan kompleksitas dinamika sosial melalui analisis konflik agama. Terlihat bahwa masalah-masalah agama memiliki potensi untuk menimbulkan ketegangan, memperlebar kesenjangan antar kelompok-kelompok, dan berpengaruh pada pergerakan politik, sehingga dapat memengaruhi persentase suara dari tahun 2018-2022. Data terkait potensi konflik pemilu 2018 hingga 2022 di Kota Bandung disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Data Faktor Potensi Konflik Di Kota Bandung

Sumber: (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023)

Konflik merupakan bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik merupakan bagian dari proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan- perbedaan baik fisik emosi, kebudayaan dan perilaku atau persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (Mustamin, 2016). Konflik tidak dapat dihindarkan di dalam kelompok masyarakat, karena konflik dapat muncul akibat adanya perbedaan kepentingan. Munculnya konflik ini berasal dari individu-individu yang berada dalam satu lingkungan, dipicu oleh keberadaan elit yang memegang kekuasaan dan memberi perintah kepada kelompok lain yang menjadi target dari perintah tersebut (Dahrendorf, 1958). Sedangkan menurut pembahasan lain konflik merupakan Benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu- individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu atau kelompok dengan pemerintah (Anggraini et al., 2019). Pandangan serupa juga diungkapkan bahwa konflik sebagai persepsi tentang adanya perbedaan kepentingan atau keyakinan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama bagi pihak yang terlibat dalam suatu konflik (Rubin, J. Z., Pruitt, D. G., & Kim, 1994) .

Teori konflik yang dikemukakan Soerjono Soekanto menjadi dasar konseptual yang sesuai. Teori tersebut fokus pada aspek-aspek sosiologis yang dapat menjelaskan dinamika konflik dalam konteks pemilu. Ide-ide seperti konflik sosial, stratifikasi sosial, dan interaksi sosial dapat diterapkan untuk menguraikan faktor-faktor yang memicu konflik dalam proses

pemilihan umum di Kota Bandung (Soekanto, 2006). Menelaah konflik pemilu menggunakan metode kualitatif dengan teori konflik ini sangat penting, karena bertujuan untuk menelaah suatu pertentangan antar individu ataupun kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, yang disertai dengan menentang pihak lawan dapat berupa ancaman atau kekerasan (Soekanto, 2006). Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan konflik Soerjono Soekanto:

- a. Perbedaan antara individu-individu yang dapat melahirkan perbedaan pendirian dan perasaan;
- b. Perbedaan kebudayaan merupakan suatu hal yang melatarbelakangi pembentukan serta perkembangan kepribadian;
- c. Perbedaan kepentingan merupakan sumber utama dari pertentangan dalam kepentingan ekonomi, dan politik;
- d. Perubahan sosial dapat merubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga menyebabkan munculnya golongan-golongan yang memiliki pendirian berbeda.

Analisis konflik pemilu di Kota Bandung melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin menjadi pemicunya. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi laporan dari para pelaksana pemilu, baik dari kandidat, pemilih (masyarakat), maupun pihak terkait lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencari jawaban atas pertanyaan "apa" yang terjadi, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" konflik pemilu muncul dan berkembang di Kota Bandung. Diharapkan bahwa melalui pemahaman yang mendalam terhadap konflik pemilu di Kota Bandung, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merancang strategi mitigasi konflik, meningkatkan integritas pemilu, dan memperkuat dasar demokrasi di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut (Creswell & Creswell, 2018), penelitian kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses metode penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas perilaku, kejadian, tempat dan waktu . Sehingga peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian Analisis Konflik Pemilu di Kota Bandung. Setelah data dianalisis, hasil penelitian dapat diinterpretasi untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan kesimpulan yang relevan

dengan konflik pemilu di Kota Bandung. Penginterpretasi hasil penelitian membantu dalam menyederhanakan kompleksitas konflik pemilu dan memberikan wawasan yang relevan untuk pembuatan keputusan.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa atau realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh pemahaman baru. Adapun metode kualitatif adalah untuk mengutamakan bahan atau hasil pengamatan yang sulit diukur dengan angka atau ukuran, terlepas dari fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam masyarakat. Metode kualitatif lebih cocok digunakan ketika fokus penelitian adalah untuk memahami konteks, makna, dan interpretasi peristiwa atau perilaku. Hal ini berbeda dengan metode kuantitatif yang lebih menitikberatkan pada pengumpulan data berupa angka dan statistik. Faktor penyebab terjadinya konflik disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Tabel Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

KAJIAN	ASPEK KAJIAN
Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan antara individu-individu • Perbedaan kebudayaan • Perbedaan kepentingan • Perubahan sosial

Sumber: (Soekanto, 2006)

Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan responden dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampling yang dipilih dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Pengambilan sampel pada penelitian ini ditetapkan dengan beberapa kriteria untuk mendapatkan hasil yang valid. Kriteria yang digunakan dalam penentuan responden meliputi pemahaman terhadap kondisi pemilu di Kota Bandung dan pemahaman terhadap konflik terkait pemilu di Kota Bandung. Responden yang dipilih merupakan perwakilan dari lembaga yang berwenang, tokoh masyarakat, dan pemilih pemula yang berada di Kota Bandung. Penelitian ini tidak memiliki batasan sampel, namun penentuan sampel responden bergantung pada kejenuhan data. Kelompok responden disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Responden Penelitian

No.	Kelompok Responden
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
2	Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung
3	Tokoh Agama Kota Bandung
4	Budayawan Kota Bandung
5	Perwakilan Masyarakat – Pemilih pemula (Generasi-Z)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelang pemilu 2024, potensi terjadinya konflik dan polarisasi masyarakat semakin tinggi terlebih karena seluruh pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak, maka wacana akan keamanan saat pemilu menjadi urgensi sendiri potensi kerawanan konflik. Wawancara dilakukan terhadap Kesbangpol Kota Bandung, KPU Kota Bandung serta Tokoh Agama, Tokoh Budayawan dan perwakilan masyarakat Kota Bandung yang merupakan pemilih pemula (Generasi-Z). Data awal potensi konflik yang menjadi landasan dalam penelitian adalah data konflik di Kota Bandung yang disajikan pada Gambar 1.1, yang kemudian dikonfirmasi menggunakan aspek kajian berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Soekanto (2006) meliputi perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial.

Kondisi Potensi Konflik Kota Bandung Tahun 2018-2022

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari Kesbangpol Kota Bandung dan disajikan pada Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa pada awal tahun 2018 Kota Bandung menghadapi tingkat potensi konflik ekonomi yang signifikan dalam konteks pemilu. Namun, hingga akhir tahun 2022, terjadi penurunan persentase potensi konflik tersebut. Fenomena ini mengindikasikan adanya dinamika yang signifikan dalam politik lokal Kota Bandung sepanjang periode tersebut, yang patut untuk dikaji lebih dalam dalam konteks pemahaman konflik politik dan sosial-budaya di tingkat lokal.

Permasalahan sosial-budaya seringkali menjadi pokok perhatian dalam tahun-tahun politik, terutama dalam konteks persiapan menghadapi pemilu serentak yang akan menentukan arah aspirasi masyarakat. Konflik politik dalam konteks pemilu sering kali muncul karena persaingan antar partai politik, perbedaan ideologi, dan isu-isu sensitif yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Karakteristik dan kebijakan dari masing-masing kandidat, serta strategi kampanye yang digunakan, dapat menjadi pemicu utama bagi munculnya konflik politik.

Selain itu, aspek Hankamnas (Pertahanan dan Keamanan Nasional) juga dapat menjadi sumber konflik selama pemilu. Ketegangan politik atau perbedaan pandangan terkait kebijakan pertahanan dan keamanan nasional sering kali menjadi titik-titik gesekan di antara para peserta pemilu. Isu-isu keamanan bisa dimanfaatkan sebagai alat politik selama masa kampanye, yang kemudian dapat memicu ketegangan di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, faktor perselisihan antara organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan instansi-instansi lainnya juga sering muncul selama periode pemilu. Perselisihan ini dapat timbul akibat perbedaan pandangan, interpretasi isu politik, atau persaingan kepentingan antar pihak-pihak yang terlibat. Dalam suasana kompetisi politik yang ketat, peningkatan ketegangan bisa menjadi hal yang wajar terjadi.

Namun, penting untuk diingat bahwa konflik yang terjadi selama pemilu tidak selalu bersifat negatif. Konflik dapat pula menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Konflik yang dihadapi masyarakat bisa menjadi peluang untuk mendiskusikan isu-isu yang penting bagi mereka, serta mencari solusi bersama untuk masalah-masalah yang dihadapi.

Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan semangat "*Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh*" sebagai landasan bagi tindakan-tindakan yang diambil oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ormas, LSM, dan instansi-instansi lainnya. Semboyan ini, yang berasal dari budaya Jawa, mendorong untuk saling mengingatkan, saling mengasahi, dan saling menjaga. Implementasi semboyan ini dapat membantu mempererat tali persaudaraan antara berbagai pihak, sehingga konflik dapat diatasi secara lebih baik dan kerja sama dapat terwujud.

Selain itu, dalam menghadapi konflik politik yang mungkin muncul selama pemilu, pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog antarberbagai pihak menjadi sangat penting. Pembangunan pemahaman bersama tentang isu-isu yang menjadi sumber konflik, serta upaya untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam mengelola konflik politik dengan baik.

Dalam mengembangkan pendekatan ini, peran lembaga-lembaga pendidikan dan penyuluhan politik juga tidak boleh diabaikan. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi dan pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab. Melalui penyuluhan dan pelatihan yang tepat, masyarakat dapat dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses pemilu.

Dengan demikian, meskipun konflik politik selama pemilu dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi stabilitas dan kemajuan suatu masyarakat, namun dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama yang baik antarberbagai pihak, konflik tersebut dapat diatasi secara efektif. Selain itu, konflik juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.

Kondisi Potensi Konflik terkait Pemilu di Kota Bandung Tahun 2024

Bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi potensi konflik terkait pemilu di Kota Bandung pada Tahun 2024 berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Perbedaan Antar Individu

Perbedaan individu merupakan perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat, yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual yang menjadi ciri dan sifat orang yang dapat menjadi pembeda individu satu dengan yang lain. Sifat individu dapat mengalami perubahan sebagai bentuk peralihan tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus menerus karena sifat sosial yang dinamis (Yanti et al., 2020). Konflik dapat terjadi antar individu dalam suatu kelompok karena faktor perbedaan pandangan dan kepentingan dari berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Definisi tersebut dapat menjelaskan konflik dalam kegiatan politik yang melibatkan banyak individu dan kelompok. Perbedaan dari berbagai individu tersebut dapat menghasilkan banyak pemikiran dan kebutuhan yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi pemicu adanya konflik terkait politik, baik yang dipicu dari perbedaan pilihan, perbedaan kepercayaan, norma, nilai, maupun dari isu penting yang menjadi fokus utama dari tiap individu. Salah satu aspek mendasar terkait individu yang sering menimbulkan konflik dalam pemilu adalah kepercayaan atau agama.

Data Kesbangpol pada Gambar 1.1 menunjukkan terdapat penurunan konflik akibat perselisihan terkait agama di Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2022. Penyebab penurunan konflik agama dalam pemilu di Kota Bandung serta potensi dampaknya terhadap pemilu yang akan datang menjadi subjek wawancara dengan responden. Menurut Bapak Bachtiar, responden yang merupakan Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik Kesbangpol Kota Bandung, Bandung merupakan daerah yang heterogen dengan penduduk

yang mewakili beragam agama, bahkan memiliki warga yang menganut kepercayaan lainnya. Meskipun demikian, harmoni dan toleransi antarumat beragama telah menjadi ciri khas masyarakat Kota Bandung, tercermin dari adanya kampung toleransi di berbagai wilayah. Bapak Osin Sodikin, responden yang merupakan budayawan Sunda menambahkan bahwa perubahan demografi, seperti pertumbuhan populasi dan perubahan komposisi penduduk, dapat memengaruhi dinamika politik dan preferensi pemilih. Kemungkinan adanya generasi baru yang lebih terbuka terhadap pemilihan tanpa terpaku pada faktor agama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya faktor agama dalam pemilu. Meskipun demikian, penurunan faktor agama tidak selalu menjadi penentu dalam pemilu, karena masyarakat Kota Bandung telah menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih cerdas terhadap proses pemilu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Osin Sodikin. Kesimpulan ini diperkuat dengan pandangan bahwa setiap agama menawarkan konsep perdamaian dan solusi terbaik untuk mengatasi konflik, menunjukkan bahwa keyakinan agama masih memainkan peran penting dalam memelihara kedamaian dan keselamatan masyarakat. Kenyataan ini menyebabkan penganut masing-masing agama melakukan klaim ekstrim bahwa agama yang dianutnya benar, sehingga sering terjadi benturan keyakinan yang dapat memicu konflik antar umat beragama. Bentrokan seperti itu tidak dapat dihindari, karena terdapat banyak agama yang berbeda di dunia (Lestari, 2020). Namun, dalam kasus konflik pemilu akibat perbedaan individu dalam hal kepercayaan di Kota Bandung, benturan tersebut dapat diminimalisir dengan kehidupan heterogen yang berdampingan dan pemahaman bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan.

Perbedaan Kebudayaan

Perbedaan dalam kebudayaan merupakan suatu fenomena yang mencakup kompleksitas yang meliputi aspek-aspek seperti ilmu pengetahuan, kebiasaan, kepercayaan, seni, moralitas, hukum, tradisi, dan kemampuan lainnya. Dalam pandangan ini, setiap masyarakat di dunia memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khasnya, dan kebudayaan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka. Teori ini diperkuat oleh Hatu (2011), yang menegaskan bahwa kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat, serta menjadi bagian integral dari identitas kolektif suatu kelompok. Keberadaan kebudayaan tercermin dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan membentuk identitas kolektif yang mengikat mereka sebagai suatu entitas sosial. Perbedaan antara kebudayaan, di satu sisi, didasarkan pada tingkat

keterbukaan terhadap pengaruh luar, dengan beberapa kebudayaan cenderung mempertahankan sifat tertutup dan mewarisi nilai-nilai tersebut secara turun-temurun.

Dalam konteks pemilihan calon dalam sebuah pemilihan umum, peran latar belakang kebudayaan menjadi penting dalam pertimbangan pemilih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Fajar Kurniawan dari KPU Kota Bandung, representasi kebudayaan dalam pemerintahan sering kali menjadi alasan bagi sebagian pemilih untuk memilih calon tertentu. Namun demikian, Bapak KH. Abdul Kohar Nurzaman Al-Qudsy Lc mengingatkan bahwa latar belakang kebudayaan seharusnya tidak menjadi satu-satunya kriteria dalam memilih calon. Aspek-aspek seperti kompetensi, integritas, visi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah juga harus dipertimbangkan secara serius. Pandangan ini menunjukkan bahwa, sementara kebudayaan dapat memengaruhi preferensi pemilih dalam konteks tertentu, budaya politik yang terbuka terhadap partisipasi publik juga memiliki peran krusial dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses politik, sesuai dengan temuan penelitian oleh Chan et al., (1996). Dengan demikian, hubungan antara kebudayaan dan politik adalah hal yang kompleks dan sering kali melibatkan banyak faktor yang saling terkait dan mempengaruhi.

Perbedaan Kepentingan

Konflik, menurut definisi yang diberikan oleh Pritt dan Rubbin dalam Irwandi & Chotim (2017), merujuk pada persepsi akan adanya perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa tujuan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak dapat dicapai secara bersamaan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat muncul karena latar belakang perasaan, pandangan, dan budaya yang berbeda di antara individu atau kelompok. Situasi ini dapat terjadi ketika setiap individu atau kelompok memiliki preferensi atau kepentingan yang berbeda terkait dengan kandidat atau isu tertentu. Dalam banyak kasus, konflik yang timbul dari perbedaan kepentingan ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Soekanto, 2006).

Adanya perbedaan kepentingan tersebut sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik sosial, karena kepentingan itu sendiri adalah suatu hal yang esensial bagi kelangsungan hidup individu maupun kelompok. Ketika individu berhasil memenuhi kepentingannya, ia akan merasakan kepuasan. Namun, ketika mengalami kegagalan dalam memenuhi kepentingannya, hal tersebut tidak hanya dapat menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, tetapi juga berpotensi memperburuk hubungan interpersonal dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Pertanyaan kemudian muncul, apakah perbedaan

kepentingan pemilih dapat menimbulkan konflik di masyarakat, yang bahkan dimulai sejak di tingkat keluarga?

Hasil wawancara dengan berbagai pihak memberikan gambaran bahwa perbedaan kepentingan pemilih memang memiliki potensi untuk memicu konflik di masyarakat, bahkan di tingkat terendah seperti dalam lingkup keluarga. Bapak Bachtiar, kepala sub bidang pendidikan politik Kota Bandung, menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik bisa saja menimbulkan ruang diskusi dan perdebatan di antara masyarakat atau keluarga. Namun, dalam Pemilu 2019, meskipun polarisasi politik begitu terasa, masyarakat Indonesia telah menunjukkan bahwa ruang-ruang tersebut biasanya berada pada tataran yang sehat, yakni pada tataran gagasan, narasi, dan argumentasi, tanpa sampai menimbulkan konflik sosial yang merugikan.

Rahmayanti, pemilih pemula yang terlahir di antara tahun 1997-2012 dan termasuk ke dalam kelompok Generasi-Z, juga memberikan perspektif yang sejalan dengan hal tersebut. Menurutnya, perbedaan pandangan politik di antara anggota keluarga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik, terutama jika perbedaan tersebut melibatkan nilai-nilai atau keyakinan yang sangat penting bagi masing-masing individu. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perbedaan kepentingan memang dapat menimbulkan konflik dalam pemilu karena setiap individu memiliki preferensi atau kepentingan yang berbeda terkait dengan kandidat atau isu tertentu. Dalam konteks keluarga, perbedaan pandangan politik di antara anggota keluarga juga dapat menghasilkan ketegangan dan konflik, terutama jika perbedaan tersebut melibatkan nilai-nilai atau keyakinan yang dianggap sangat penting oleh masing-masing individu.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, ras, dan agama, seringkali mengalami ketidaksetaraan dalam kesejahteraan masyarakatnya. Ketidaksetaraan ini dapat memicu timbulnya konflik, baik itu antar kelompok, individu, maupun antarnegara. Muspawi (2014) mendefinisikan konflik sebagai keadaan dimana terjadi ketegangan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau sumber daya. Konflik sendiri dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pribadi, kelompok sosial, masyarakat, organisasi, atau antarnegara.

Dengan demikian, pemahaman akan perbedaan kepentingan dan konflik serta upaya-upaya penanganannya menjadi sangat penting dalam konteks pemilu dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan politik, dialog antarkelompok, serta promosi perdamaian dan toleransi menjadi langkah-langkah yang harus terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas

sosial dan kedamaian dalam masyarakat. Semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, hingga individu-individu, memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kestabilan sosial. Dengan demikian, konflik dapat dihindari atau diminimalkan, sehingga masyarakat dapat terus berkembang secara damai dan berkelanjutan.

Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan fenomena yang mencakup perubahan dalam lembaga kemasyarakatan suatu masyarakat yang berdampak pada sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku antar kelompok di dalamnya (Valencia & Giraldo, 2019). Konflik sosial seringkali muncul sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi dengan cepat di dalam masyarakat. Meskipun perubahan merupakan hal yang lazim, namun jika terjadi secara mendadak atau dengan kecepatan yang tinggi, dapat memicu timbulnya konflik sosial (Soekanto, 2006). Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat dapat mengakibatkan guncangan dalam masyarakat, bahkan memunculkan penolakan terhadap perubahan tersebut karena dianggap dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat yang telah mapan.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah perubahan sosial yang cepat, terutama dengan kemajuan akses internet seperti media sosial, dapat menyebabkan golongan-golongan dalam masyarakat memiliki pendirian yang berbeda? Dalam hal ini, Rahmayanti, seorang generasi-Z, menyatakan bahwa dengan adanya era digitalisasi, setiap generasi memiliki akses yang mudah terhadap informasi teknologi melalui media sosial atau televisi. Hal ini menjadi penting karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti contohnya *buzzer* (pihak yang dibayar untuk berkampanye) yang dapat menciptakan kerumitan dalam suasana menjelang pemilihan umum, dan membuka peluang terjadinya perbedaan pendirian dalam memberikan suara saat pemilu. Rahmayanti menjelaskan bahwa dalam konteks ini, penyebaran berita melalui media sosial memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan mengubah dukungan masyarakat pemilih terhadap calon tertentu. Misalnya, pada awalnya pendukung kandidat pertama mungkin berharap agar kandidat tersebut berhasil memenangkan pertarungan, namun pada kesempatan selanjutnya, ketika kandidat kedua diabaikan oleh pesaingnya, hal tersebut dapat memunculkan rasa empati terhadap kandidat kedua. Dengan tersebarnya informasi tersebut melalui media sosial, masyarakat memiliki potensi untuk terpengaruh dan

mengubah dukungannya, dengan beralih mendukung kandidat kedua sebagai respons terhadap perkembangan informasi yang terjadi di dunia digital.

Pendapat tersebut didukung oleh Bapak Bachtiar, kepala sub bidang pendidikan politik Kota Bandung, yang menyatakan bahwa dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk meningkatkan literasinya. Dengan peningkatan literasi tersebut, informasi yang diterima oleh masyarakat tentang suatu topik menjadi lebih komprehensif, dan dapat menjadi sumber bagi masyarakat untuk mengubah pendiriannya terhadap pemahaman yang dimilikinya sebelumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial memang memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemilihan umum yang akan berlangsung. Namun demikian, masyarakat telah menunjukkan kecerdasannya dalam memilah informasi yang diterima dari media massa. Mereka mampu untuk memahami dengan cermat informasi yang disajikan di media sosial, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya perubahan pendirian yang dipicu oleh informasi yang tersebar secara daring.

Selain itu, media sosial juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena memungkinkan pengguna untuk memperoleh dan berbagi informasi dengan cepat. Hal ini terbukti dengan kemenangan Barack Obama dalam dua kali pemilihan presiden di Amerika Serikat, yang dalam sebagian besar didukung oleh kampanye yang efektif melalui jejaring sosial (Suhendra, 2015).

Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi perubahan pendirian dalam masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan peran dan dampak media sosial dalam proses demokrasi, serta mengembangkan strategi yang tepat untuk memanfaatkannya secara positif dalam memperkuat sistem politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

SIMPULAN

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Presiden Republik Indonesia, 2017). Penyelenggaraan pemilu tidak akan terlepas dari konflik, baik konflik antar-pemilih ataupun dengan penyelenggara pemilu. Konflik dalam pemilu tidak dapat dihindari teruma ketika perbedaan aspirasi atau

kepentingan suatu kelompok.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di Jawa Barat, Kota Bandung menjadi lingkungan yang dinamis selama proses pemilu. Dengan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat, menghadapi tantangan kompleks terkait konflik dalam pemilu. Konflik-konflik tersebut tidak hanya berasal dari persaingan politik, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*, konflik dalam pemilu di Kota Bandung melibatkan pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu. Sebagai institusi penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran penting dalam pencegahan konflik. Kesbangpol Kota Bandung berperan dalam pendidikan politik yang dapat menjadi landasan dalam minimasi konflik dalam pemilu. Selain itu, tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan budayawan juga memiliki peran yang signifikan dalam mencegah adanya konflik, terutama dalam kondisi pemilu yang rawan penyebaran berita bohong (*hoax*) maupun peningkatan politik identitas yang dapat berkembang menjadi politik kebencian. Peran pihak-pihak tersebut sangat besar dalam pencegahan konflik politik di masa pemilu, terutama yang dapat terjadi di kalangan masyarakat muda seperti Generasi-Z yang merupakan pemilih pemula.

Kota Bandung, sebagai kota yang heterogen, menunjukkan keberagaman agama dan kepercayaan dengan adanya kampung toleransi di berbagai wilayah. Meskipun perbedaan politik dapat muncul dari pilihan yang berbeda, keselarasan dan toleransi di antara masyarakat Kota Bandung dapat meminimalkan konflik. Pemilih, menurut informasi dari KPU, mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih calon, termasuk latar belakang kebudayaan. Sosialisasi intensif oleh penyelenggara pemilu diharapkan dapat membantu mengurangi gesekan antar kelompok budaya. Generasi-Z, yang hidup dalam era digitalisasi, memiliki kemampuan akses informasi teknologi melalui media sosial atau televisi, yang dapat memengaruhi perbedaan pendapat dan dukungan pemilih. Tokoh agama menekankan relevansi latar belakang kebudayaan dalam pemilihan calon, sementara tokoh budayawan menyuarakan bahwa faktor agama tidak selalu menjadi penentu dalam pemilu, dengan masyarakat yang semakin cerdas dalam memahami pemilihan tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh faktor agama. Kesimpulan tersebut menyoroti kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi konflik Pemilu di Kota Bandung, menekankan pentingnya pendekatan holistik dan pendidikan politik untuk menjaga partisipasi yang sehat dalam proses demokrasi.

Di tengah dinamika pemilu yang semakin kompleks dan berkembang, media sosial

memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap para kandidat dan partai politik. Dengan kemajuan teknologi informasi, informasi dapat dengan cepat dan mudah disebarkan melalui berbagai platform media sosial. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara lebih aktif dalam proses politik dan pemilihan. Namun, di sisi lain, media sosial juga membawa risiko adanya *hoax* yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih.

Dalam menghadapi dinamika ini, pendidikan politik menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam proses politik. Pendidikan politik yang baik akan membantu masyarakat dalam memahami isu-isu yang kompleks dan menganalisis informasi dengan kritis, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan umum. Pendidikan politik tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya konflik akibat kesalahan persepsi, disinformasi, dan *hoax* yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., Afrizal, A., & Indradin, I. (2019). Regulasi Konflik Pemilu (Studi Kasus Resolusi Konflik Pilkada 2015 dan Persiapan Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(2), 177-184.
- Anggara, D. (2019). Kajian Umum Pilkada. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689-1699.
- Chan, J. L., Jones, R. H., & Lüder, K. G. (1996). GOVERNMENTAL AND Editor : ACCOUNTING INNOVATIONS. *Governmental Nonprofit Accounting*, 9, 1-19.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dirgantara, A. (2023). *Ridwan Kamil Jadi Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran di Jawa Barat*. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2023/11/17/17531921/ridwan-kamil-jadi-ketua-tim-kampanye-daerah-prabowo-gibran-di-jawa-barat#google_vignette
- Hatu, R. (2011). PERUBAHAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT PEDESAAN (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik). *Jurnal INOVASI*, 8(4), 3-9.
- Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta. *Jispo*, 7(2), 24-42.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. (2023). *Jumlah Potensi Konflik di Kota*

- Bandung. KESBANGPOL. <https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/jumlah-unjuk-rasa-berdasarkan-tahun-di-kota-bandung/>
- Lestari, J. (2020). PLURALISME AGAMA DI INDONESIA: Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1714>
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Penawar*, 16(2), 41–46.
- Mustamin, M. (2016). Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 185. <https://doi.org/10.58258/jime.v2i2.109>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UU no.7 2019 Pemilu Serentak. *Undang-Undang Pemilu*.
- Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150>
- Suhendra, A. (2015). SENJATA BARU DALAM RUANG POLITIK: Konstruksi Sosial Penggunaan Jejaring Sosial Online dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(1), 1–12.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi suatu pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.
- Yanti, F., Sari, P. I., & Magdalena, I. (2020). Implikasi Sumber Perbedaan Individu Dalam Lingkup Pendidikan Di Sdn Kalideres 06 Pagi. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 288–303.